



LAPORAN KINERJA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas kinerja sangat penting bagi BPBD Provinsi Riau sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Riau Tahun 2023 masih terdapat kekurangan, diharapkan masukan positif dalam penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Riau Tahun 2023 agar lebih baik untuk mewujudkan Riau tangguh dalam menghadapi bencana.

Semoga LKjIP Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi acuan pengambilan kebijakan dan perencanaan program kegiatan selanjutnya.

Pekanbaru, Maret 2024

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau,**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau	2
1.3 Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau	2
1.4 Aspek Strategis BPBD Provinsi Riau Sumber Daya Aparatur	5
1.5 Permasalahan Utama Penanggulangan Bencana Provinsi Riau	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	20
2.2 Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.1 Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Review Inspektorat	
2. Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.4.1	5
Tabel 1.4.2	7
Tabel 1.4.3	8
Tabel 1.4.4	10
Tabel 1.4.5	11
Tabel 1.4.6	12
Tabel 1.4.7	14
Tabel 2.1.1	23
Tabel 2.1.2	24
Tabel 2.2.1	25
Tabel 2.2.2	25
Tabel 2.2.3	26
Tabel 3.1.	28
Tabel 3.1.1	30
Tabel 3.1.2	31
Tabel 3.1.3.a.....	32
Tabel 3.1.3.b.....	33
Tabel 3.1.5	36
Tabel 3.1.6	37
Tabel 3.2.1	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.4.1.....	6
Gambar 1.4.2.....	8
Gambar 1.4.3.....	9
Gambar 1.4.4.....	11
Gambar 1.4.5.....	12
Gambar 1.4.6.....	13
Gambar 3.1.2.....	32
Gambar 3.1.6.a.....	38
Gambar 3.1.6.b.....	38
Gambar 3.1.6.c.....	39
Gambar 3.1.6.d.....	39
Gambar 3.1.6.e.....	40
Gambar 3.1.6.f.....	41

BAB I

KEGIATAN PENINJAUAN PENANGAMAN BANJIR OLEH GUBERNUR RIAU



1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau serta wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja dilingkungan BPBD Provinsi Riau.

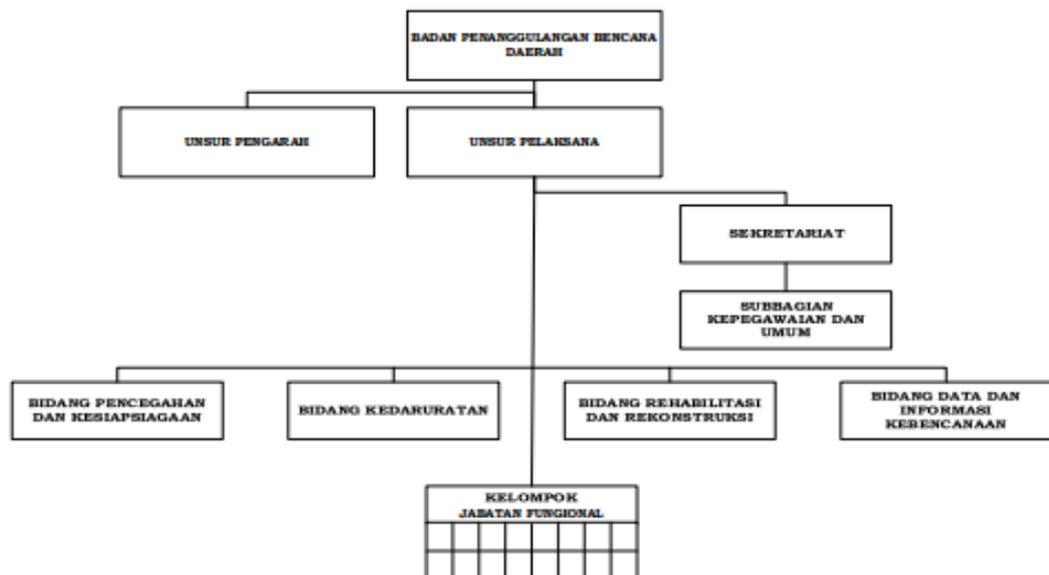
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKjIP ini turut menginformasikan Program yang mendukung Tujuan/Sasaran, realisasi anggaran, faktor yang mempengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK, berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh. Keberhasilan capaian kinerja ini mendapat dukungan dengan adanya regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan pencapaian tujuan/sasaran diantaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 20217 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023

1.3 Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Badan Ex. Officio Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana, namun hingga saat ini Unsur Pengarah BPBD Provinsi Riau belum dibentuk dikarenakan keterbatasan anggaran.
- II. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan, membawahi:
 1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian, membawahi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi ancaman bencana.
 3. Bidang kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
 5. Bidang Data dan Informasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan dan Subbidang Sistem Informasi.

6. Kelompok Fungsional yang memiliki tugas berdasarkan fungsi masing-masing manajemen, yang terdiri dari :
 - a. Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya;
 - b. Fungsional Penata Kebencanaan Ahli Madya;
 - c. Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda;
 - d. Fungsional Penata Kebencanaan Ahli Muda;
 - e. Fungsional Analis Kebencanaan Ahli pertama;
 - f. Fungsional Penata Kebencanaan Ahli pertama;
 - g. Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - h. Fungsional Arsiparis Ahli Muda;
 - i. Fungsional Arsiparis Ahli Pertama;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Aspek Strategis BPBD Provinsi Riau Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah sebanyak 60 orang. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau:

1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Perkembangan jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah sebanyak 60 orang. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.4.1 berikut ini.

Tabel 1.4.1
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Pelaksana	1	0	1
2	Fungsional Madya	1	1	2
3	Sekretariat	13	6	19
4	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	8	5	13
5	Bidang Kedaruratan	11	1	12
6	Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi	5	2	7
7	Bidang Data dan Informasi	6	0	6
JUMLAH		45	15	60
PERSENTASE		75,00	25,00	100,00

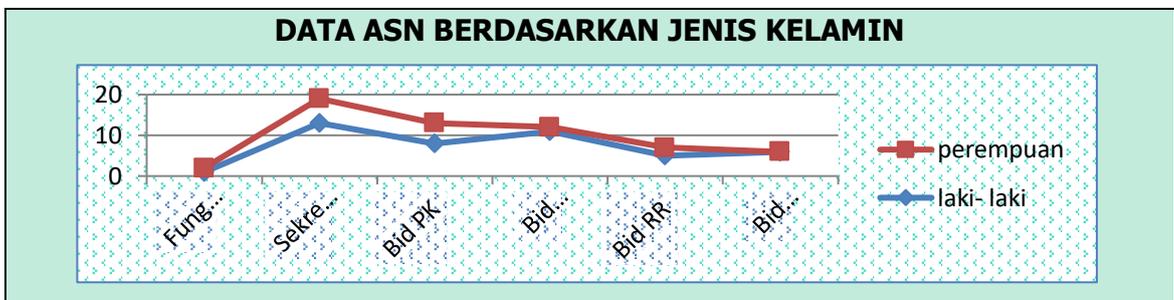
Sumber Data : November 2023

Terlihat dari tabel 1.4.1 di atas menjelaskan bahwa pada BPBD Provinsi Riau jumlah ASN berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 45 orang dengan

persentase 75 % dan jumlah ASN perempuan sebanyak 15 orang dengan persentase 25 % total jumlah pegawai ASN pada BPBD Provinsi Riau sebanyak 60 orang.

BPBD Provinsi Riau terdapat 2 orang Fungsional Ahli Madya Kebencanaan yang terdiri dari 1 laki-laki 1 perempuan. Jika diklasifikasikan berdasarkan per bidang terlihat pada sekretariat jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki terdapat 13 orang dan Perempuan 6 Orang, pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ASN berjenis kelamin Laki-laki 8 Orang dan Perempuan 5 orang , Pada Bidang Kedaruratan jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki 11 orang dan perempuan 1 Orang, untuk bidang Rekonstruksi da Rehabilitasi ASN nya berjumlah 7 orang terdapat 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan di Bidang Data dan Informasi ASN berjenis Kelamin laki-laki sebanyak 6 Orang dan tidak ada ASN perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa pada BPBD Provinsi Riau ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah ASN berjenis kelamin Perempuan. Berikut Grafik yang menggambarkan perbandingan dari jumlah ASN tersebut :



Gambar 1.4.1
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin BPBD Provinsi Riau Tahun 2023

2. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan Ruang gaji pegawai pada BPBD Provinsi Riau terbagi atas 4 Ruang golongan yakni ruang golongan I hingga IV, berikut tabel yang data pegawai sesuai dengan ruang gajinya:

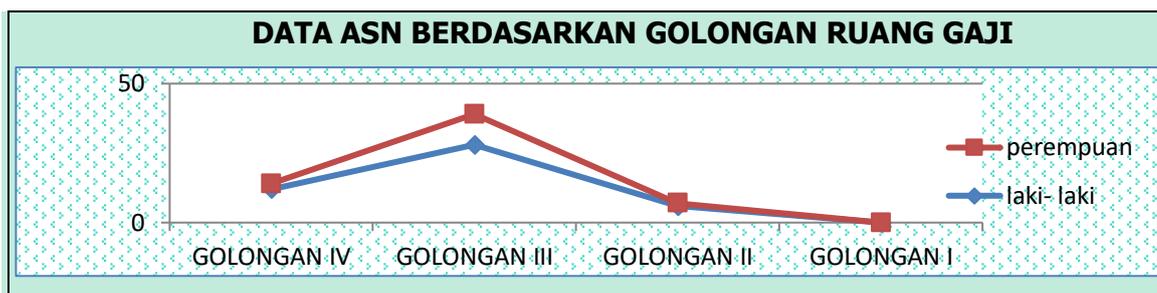
Tabel 1.4.2
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

No.	GOLONGAN RUANG GAJI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	GOLONGAN IV	12	2	14	23,33
2	GOLONGAN III	28	11	39	65,00
3	GOLONGAN II	6	1	7	11,67
4	GOLONGAN I	0	0	0	0,00
JUMLAH		46	14	60	100,00

Sumber Data : November 2023

Jika melihat pada tingkat Golongan Ruang Gaji aparatur BPBD Provinsi Riau, secara total berjumlah 60 orang dengan komposisi ASN Golongan IV sebanyak 12 Orang atau 23,33%, Golongan III sebanyak 39 Orang atau 65 %, Sedang Golongan Ruang Gaji terkecil adalah Golongan II berjumlah 7 orang atau sekitar 11,67%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah persentase ASN dengan Golongan III merupakan persentase golongan Ruang Gaji ASN tertinggi dibandingkan dengan ASN golongan IV. Sedangkan bila diklasifikasikan Berdasarkan Golongan Ruang Gaji, maka sebagaimana terlihat pada Gambar 1.4.2 pegawai BPBD Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 39 orang terdiri dari 28 orang laki laki dan 11 orang perempuan dengan persentase sebesar 65 % , dapat terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.4.2
Keadaan Golongan Ruang Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)
BPBD Provinsi Riau Tahun 2023

3. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau berjumlah 60 orang, berdasarkan Jabatan terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.4.3 berikut ini :

Tabel 1.4.3
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN / ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	ESELON II	1	0	1	1,56
2	ESELON III	4	1	5	7,81
3	ESELON IV	1	0	1	1,56
4	FUNGSIONAL MADYA	1	1	2	3,13
5	FUNGSIONAL MUDA	12	5	17	26,56
6	FUNGSIONAL PERTAMA	5	1	6	10,94
7	Staff /Non Struktural	21	7	28	48,44
JUMLAH		45	15	60	100,00

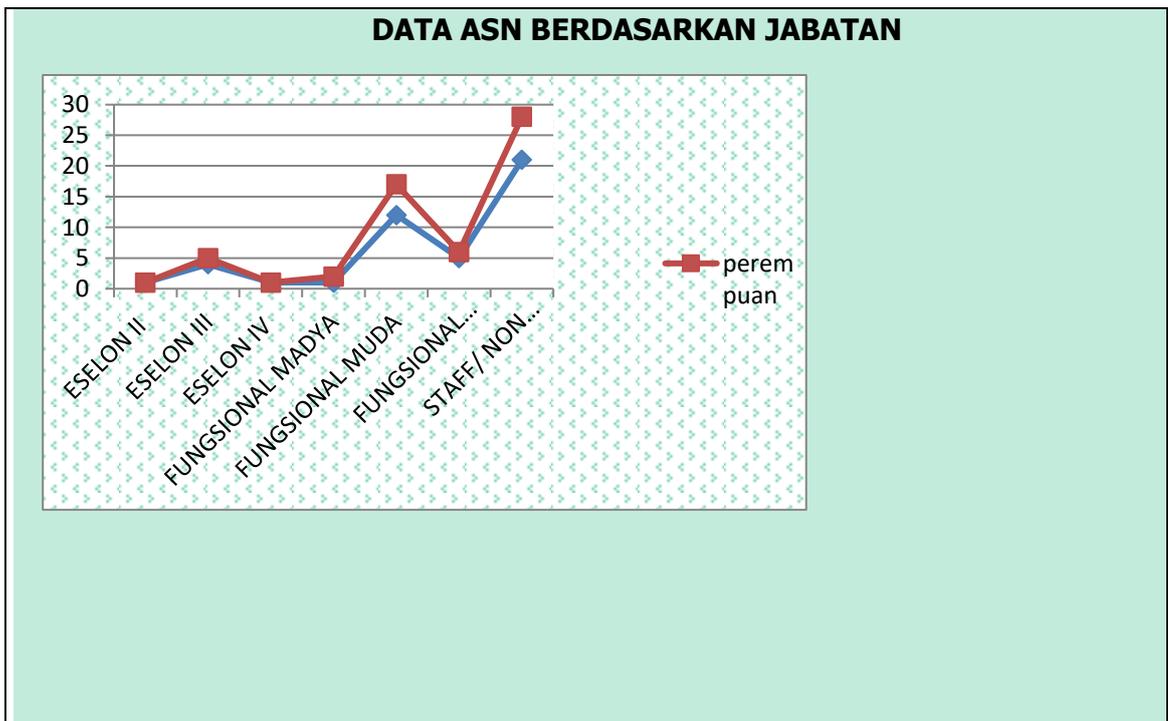
Sumber Data : November 2023

Dari sejumlah 60 pegawai BPBD Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau; 4 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, 1 eselon IV, 2 Orang dengan jabatan Fungsional Madya dan 17 orang dengan jabatan Fungsional Muda serta 6 orang dengan jabatan Fungsional Pertama, dan 21

orang dengan jabatan staff. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau.

Hingga revisi Renstra BPBD Provinsi Riau tahun 2019–2024, kondisi pejabat Eselon Pada BPBD Provinsi Riau telah terpenuhi dan tidak terdapat kekosongan jabatan sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.3 di atas.

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Menurut Jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.4.3 berikut :



Gambar 1.4.3
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan

4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenjang Fungsional Tertentu

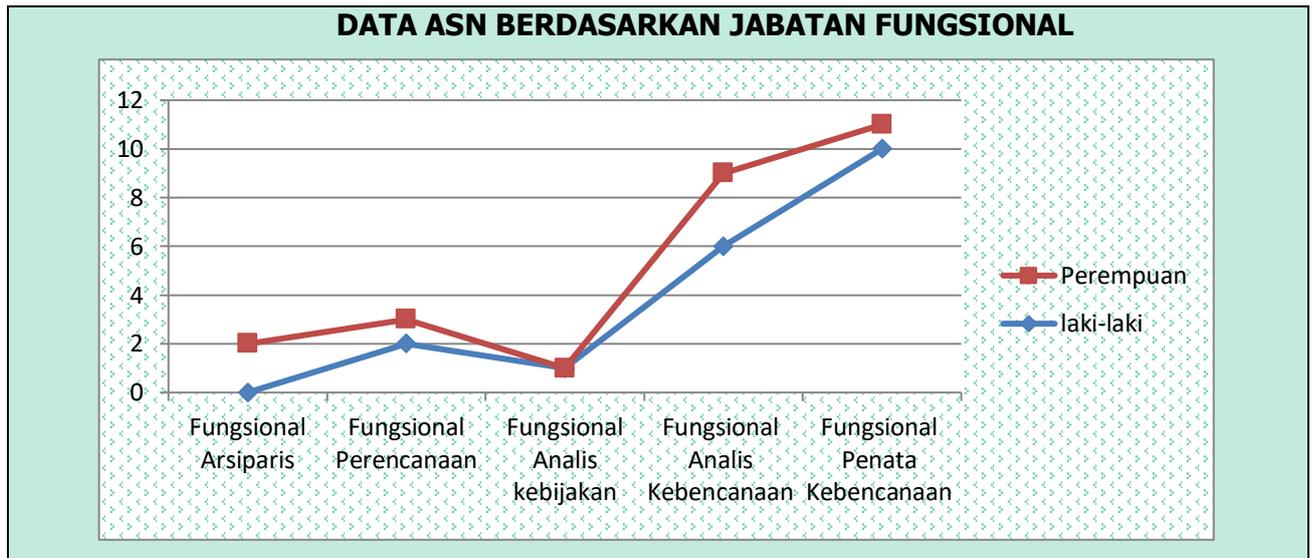
Berdasarkan dari pengangkatan ASN ke Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu. Berikut dijelaskan untuk jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada BPBD Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 1.4.4
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Fungsional Arsiparis	0	2	2	7,69
2	Fungsional Analis Kebijakan	1	0	1	3,85
3	Fungsional Perencana	1	1	3	11,54
4	Fungsional Analis Kebencanaan	6	3	9	34,62
5	Fungsional Penata Kebencanaan	10	1	11	42,31
JUMLAH		19	7	26	100,00

Sumber Data : November 2023

Secara umum dilihat dari jumlah pegawai yang ada di BPBD Provinsi Riau terdapat 26 Orang pegawai yang mengemban Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Arsiparis 2 Orang dengan persentase 7.69 %, Fungsional Perencana sebanyak 3 Orang dengan Persentase 11.54 %, Fungsional Analis Kebijakan sebanyak 1 Orang dengan Persentase 3.85 %, , Fungsional Analis Kebencanaan sebanyak 9 Orang dengan persentase 34.62 %, Fungsional Penata Kebencanaan sebanyak 11 Orang dengan persentase 42.31 %. dapat terlihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 1.4.4
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan Fungsional

5. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

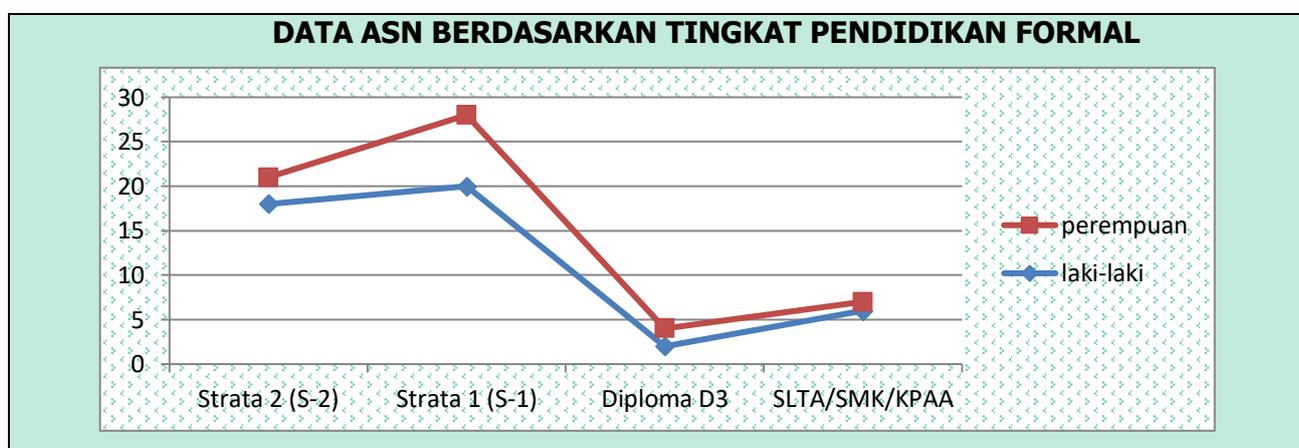
Dari data pada Tabel 1.4.5 dibawah ini diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan BPBD Provinsi Riau.

Tabel 1.4.5
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Strata 2 (S-2)	18	3	21	35,00
2	Strata 1 (S-1)	20	8	28	46,67
3	Diploma 3	2	2	4	6,67
4	SLTA/SMK/KPAA	6	1	7	11,67
JUMLAH		46	14	60	100,00

Sumber Data : November 2023

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau cukup Baik terlihat bahwa tingkat pendidikan ini didominasi oleh tingkatan Strata I (S.1) yang berjumlah 20 orang atau 46,67 %, dimana dari 60 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 18 orang atau 35 % berpendidikan Sarjana Strata II, sedangkan terdapat 4 orang atau 6.67 % dengan pendidikan D3, serta juga terdapat 7 Orang atau 11,67% untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan SLTA/SMK, dan tidak ada pegawai yang berpendidikan berpendidikan SLTP. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.4.5
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau menurut Tingkat Pendidikan Formal

6. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjurangan

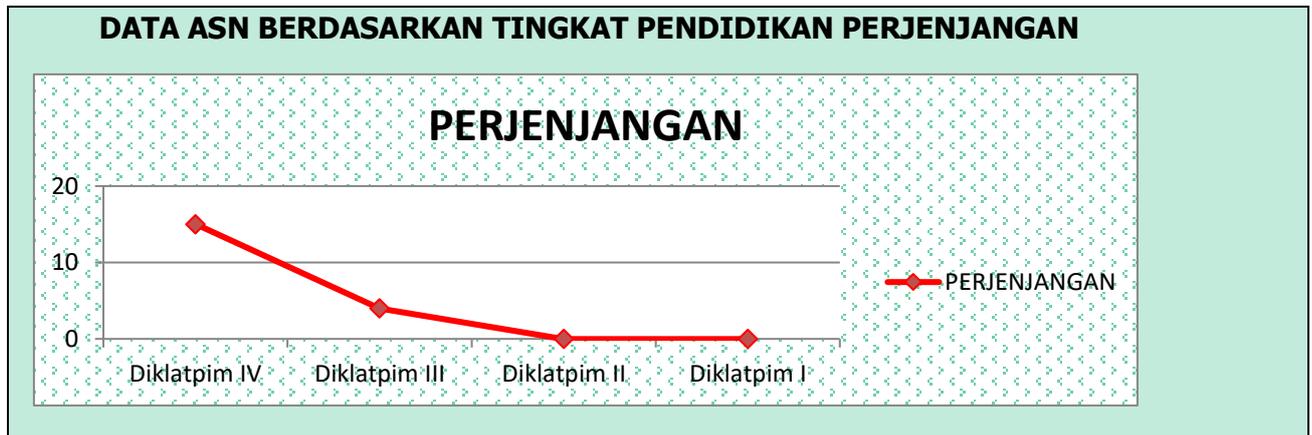
Data pada Tabel 1.4.6 Mengambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan penjurangan berjumlah 16 orang.

Tabel 1.4.6
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Penjurangan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Diklatpim IV	15
3	Diklatpim III	4
4	Diklatpim II	0
5	Diklatpim I	0
JUMLAH		19

Sumber Data : November 2023

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan perjenjangan terdapat 15 orang ASN yang telah mengikuti diklatpim IV, 4 Orang ASN telah mengikuti diklatpim III kemudian dari data tersebut diatas dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.4.6
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Diklat Perjenjangan

7. Fasilitas Penunjang (Perlengkapan Kantor)

Dalam kaitannya untuk mendukung pekerjaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Gedung yang terdiri 3 (tiga) lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC) dan didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Komputer, Printer, Mesin Scanner dan Fotocopi, kendaraan dinas, serta jaringan WiFi untuk mempermudah akses informasi global. Selanjutnya beberapa perlengkapan lainnya yang mendukung kegiatan program bidang kedaruratan kebencanaan. Adapun fasilitas penunjang BPBD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 1.4.7
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBD Provinsi Riau

No	Nama Barang	Jumlah (dalam Bidang/unit/buah/set)
1	Tanah	2
	Tanah	2
	Tanah Persil	2
2	Peralatan dan Mesin	3280
	Alat-Alat Besat	1450
	Alat-Alat Besar Darat	60
	Alat-Alat Besat Bantu	1390
	Alat-Alat Angkutan	79
	Alat Angkutan Darat Bermotor	26
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3
	Alat Angkut Apung Bermotor	17
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	33
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	82
	Alat Bengkel Bermesin	22
	Alat Bengkel Tak Bermesin	50
	Alat Ukur	10
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	871
	Alat Kantor	91
	Alat Rumah Tangga	545
	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	235
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	202
	Alat Studio	68
	Alat Komunikasi	123
	Peralatan Pemancar	11
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	158
	Alat Kedokteran	158
Alat Persenjataan	261	
Persenjataan Non Senjata Api	261	
Komputer	177	
Komputer Unit	90	
Peralatan Komputer	87	
3	Gedung dan Bangunan	3
	Bangunan Gedung	3
	Bangunan Tempat Kerja	1
	Bangunan Gudang	2

4	Aset Tetap Lainnya	254
	Bahan Perpustakaan	252
	Buku dan Perpustakaan	252
	Barang Bercorak	
5	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1
	Barang Bercorak Kesenian	1
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2

Sumber Data : Desember 2023

1.5. Permasalahan Utama Penanggulangan Bencana Provinsi Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2007. Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan.

Secara umum kegiatan itu menyangkut Data dan Informasi Kebencanaan, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan untuk pemenuhan SPM sub urusan kebencanaan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan didalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari gambaran diatas, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut :

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
- 2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
- 4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2. Peluang

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 3 (tiga) Fungsi, yaitu Fungsi Koordinasi, Fungsi Komando, Fungsi Pelaksana ketiga fungsi ini memberikan kekuatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.

Ketiga Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mampu diimplementasikan dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari operasional Satuan Tugas Pos Komando Utama Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau yang mampu mengintegrasikan personil dari background yang berbeda dalam satu kesatuan Pos Komando Utama.

Dukungan Peralatan berupa Helicopter dan Pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca serta Dana Siap Pakai (DSP) kepada BPBD Provinsi Riau dalam melakukan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Riau menjadi peluang yang harus dioptimalkan pelaksanaannya. Inventarisasi keterlibatan swasta/dunia usaha dalam kewajiban CSR nya agar dapat diarahkan untuk mendukung penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

Demikian juga dari pihak legislatif yang sudah beberapa kesempatan diikutsertakan dalam tugas penanggulangan bencana sehingga membuka cakrawala

pemikiran semua pihak bahwa keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sangat penting dan strategis, ketika situasi genting dan darurat keberadaan lembaga ini menjadi tumpuan dan harapan semua orang untuk berkoordinasi dengan Gubernur, Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBD, Kepala Bappeda dan DPRD agar dapat memberikan perhatian dan dukungan yang serius terkait penguatan anggaran yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau walaupun masih jauh dari usulan kebutuhan anggaran penanggulangan bencana.

Untuk menyikapi peluang ini agar penggunaan anggaran bisa digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dipersiapkan Rencana Strategis yang komprehensif, terukur dan mengakomodir semua persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya. Selain itu keberadaan Bidang Data dan Informasi dapat menjadi jembatan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam berkoordinasi untuk Provinsi Riau yang tangguh dalam menanggulangi bencana.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan beberapa peluang yang dapat dijadikan dalam analisa SWOT :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.
3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Tersedianya Belanja Tak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan jika status siaga darurat bencana telah ditetapkan, agar dapat membantu dalam penanggulangan bencana.
5. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah, dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dengan melihat tantangan dan peluang yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penentuan strategi kebijakan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau dapat dikelompokkan ke dalam beberapa masalah pokok sebagai berikut ;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Diperlukannya Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana.	Setiap tahunnya hanya dapat melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana sebanyak 50 orang sampai dengan 60 orang relawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat tentang penetapan anggaran kebencanaan di daerah dari besaran APBD nya. 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau 3. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Belum tersedianya data relawan yang sudah mendapatkan pelatihan
2.	Diperlukannya Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana.	Sarana dan Prasarana masih belum representatif seperti Pusdatin dan peralatan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan. 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek masa umur peralatan. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan sistim informasi penanggulangan bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana dan mengurangi dampak yang terjadi dengan semangat *zero accident*.

2. Pembenahan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan lembaga yang diamanatkan dalam hal penyampaian data dan informasi kebencanaan sesuai

amanat SPM tentang pelayanan informasi Rawan Bencana yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun. Seharusnya sesuai dengan paradigma baru penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan untuk mengembalikan pulihnya aktivitas masyarakat seperti seharusnya.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta penguatan kapasitas aparatur tanggap darurat bencana. Untuk itu perlu adanya pelatihan bagi aparatur kebencanaan dalam mengupdate ketrampilannya.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana. Inventarisasi terkait dana CSR dunia usaha juga perlu dilakukan agar kewajiban dunia usaha tersebut dapat diarahkan untuk penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

BERSAMA

PERSIAPAN PELAKSANAAN GLADI KEISAPSAGAAN BERSAMA
SEKRETARIS UTAMA BNPE



2.1 Perencanaan Strategis

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik secara internal ataupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dibuat dengan acuan kepada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Acuan ini merupakan landasan dalam melaksanakan kinerja tugas pokok dan fungsi yang dipayungi dalam visi dan misi BPBD Provinsi Riau. adapun Visi dan misi BPBD Provinsi Riau sebagai berikut :

2. 1.1 Visi dan Misi

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024 yang tercantum dalam RPJMD adalah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none">– Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)– Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar– Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah
Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">– Mengurangi ketimpangan sosial– Menanggulangi kemiskinan– Menurunkan tingkat pengangguran
Bermartabat	<ul style="list-style-type: none">– Meningkatkan kehidupan beragama

	<ul style="list-style-type: none"> – Melestarikan adat istiadat – Mengembangkan nilai sosial dan budaya
Unggul	<ul style="list-style-type: none"> – Prestasi di bidang seni, budaya dan agama – Prestasi di bidang olahraga – Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan – Terobosan dan inovasi daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkan visi Provinsi Riau 2019-2024 maka misi pembangunan jangka menengah, meliputi:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, dalam rangka mendukung visi misi tersebut BPBD Provinsi berkontribusi dengan mendukung misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Seperti diketahui, dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga. Dengan demikian BPBD sudah ikut mendukung tercapainya misi ke 2 (dua) Pemerintah Provinsi Riau.

Seperti diketahui, Visi Pemerintah Provinsi Riau adalah; ***"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja"***. sedang Visi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; “*Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana*”, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau merumuskan Visi:

"Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana"

Dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga.

2. 1.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Riau

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Riau, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan yaitu Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2022 adalah terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Riau, dimana definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah terdiri dari :

- 1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
- 2) Penanganan kedaruratan bencana.
- 3) Pemulihan pasca bencana

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPBD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.1.1. berikut ini :

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".			
MISI RPJMD Riau ke – 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Regulasi dan Kelembagaan melalui upaya pengurangan resiko bencana. 2. Menyusun dokumen kebencanaan yang berbasis masyarakat dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan. 3. Mengembangkan sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan resiko bencana. 4. Memberikan Informasi dan Data terkait Rawan Bencana 5. Pengembangan dukungan evakuasi dan penyelamatan korban bencana. 6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. 7. Peningkatan SDM dalam Penanganan Darurat 8. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendata perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana. 9. Membangun koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka pemulihan pasca bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP capaian SPM Penanggulangan Bencana Provinsi Riau. 2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana. 3. Pembentukan Forum PRB di berbagai wilayah (Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi). 4. Melakukan pendidikan dan pelatihan. 5. Sosialisasi pemasangan Early Warning System. 6. Mengoptimalkan PUSDALOPS dan PUSDATIN di Provinsi, Kabupaten/Kota 7. Mengaktifkan Tim Reaksi Cepat dalam rangka dukungan ke Kabupaten/Kota 8. Menyediakan logistik dan peralatan dalam rangka penanganan darurat bencana. 9. Melatih lebih banyak SDM yang ahli dalam penanganan kedaruratan bencana. 10. Mendata Kerusakan Pasca Bencana 11. Melakukan Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan kerugian 12. Melakukan perbaikan infrastruktur pasca bencana dengan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait di Pemerintah Provinsi Riau

Untuk kebijakan yang menaungi kegiatan OPD yang bersifat rutin, maka mengacu pada misi ke 5 pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 seperti tercantum pada tabel 2.1.2 berikut ;

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".			
MISI RPJMD Riau ke – 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Riau Tangguh dalam menghadapi bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumberdaya dan Sarana Prasarana pelayanan publik BPBD. 2. Membuat Kelembagaan Data dan Informasi dalam rangka penyampaian informasi bencana. 3. Memberikan Informasi dan Data terkait Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja BPBD melalui peningkatan SDM dan Sarana Prasarana BPBD. 2. Pembentukan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Melakukan pembaharuan teknologi informasi kebencanaan yang mudah diakses oleh publik.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai tugas pokok dan fungsi , BPBD Provinsi Riau telah menyusun rencana kinerja dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2023 dituangkan dalam perjanjian Kinerja 2023.

Perjanjian Kinerja (Penja) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Penja merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

adanya perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah diperjanjikan dalam Renstra dapat disajikan dalam bentuk tabel 2.2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan*
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	100 %	100 %

Dalam mencanangkan dan mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, BPBD Provinsi Riau menjadikan Perjanjian Kinerja 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 BPBD Provinsi Riau juga memuat besaran Anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja Tahun 2023, sebagai pendukung dalam pelaksanaannya, berikut anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kinerja, dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2
Alokasi Anggaran BPBD Provinsi Riau TA 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.889.849.725,00	APBD-P
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.294.428.133,00	APBD-P
	TOTAL	22.184.277.858,00	

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, BPBD Provinsi Riau pada tahun 2023 telah melaksanakan 2 (Dua) program dan 37 (Tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar Rp.

19.629.281.514,00,-. Pada Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun 2023 terjadi beberapa pergeseran anggaran sehingga pagu BPBD menjadi sebesar Rp.22.184.277.858,00,-. Kemudian dalam perjanjian kinerja dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sesuai dengan tabel 2.2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2.3

Pemetaan Program dan Anggaran dalam mendukung Sasaran Strategis TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target perubahan	Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.889.849.725
				Program Penanggulangan Bencana	6.294.428.133

BAB III

KEGIATAN PENYERAHAN BANTUAN PADA MASYARAKAT KORBAN BANJIR DI

BENGGALIS OLEH KALAKSA BPBD

KEGIATAN PENYERAHAN BANTUAN PADA MASYARAKAT KORBAN BANJIR DI
BENGGALIS OLEH KALAKSA BPBD



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Pengukuran kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sebagaimana tindak lanjut dari PP Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Aparatur. Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menggunakan skala pengukuran hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1.
Skala Skala Nilai Peringkat Kinerja

N O.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tahun 2023 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi Riau sebagai Sasaran Strategis dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis ; Peningkatan Ketahanan Daerah



Beberapa rekomendasi tindakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari analisis kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Rekomendasi

tindakan tersebut dinilai dari kondisi daerah berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang difokuskan untuk pemerintah daerah. 71 indikator hanya melingkupi 8 (delapan) jenis bahaya yang menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bahaya tersebut yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan banjir bandang. Untuk melihat beberapa rekomendasi tindakan yang akan ditindaklanjuti dari kajian risiko bencana ini perlu adanya analisis kondisi daerah yang mengacu kepada indikator yang ada. Adapun rekomendasi tindakan penanggulangan bencana berdasarkan 7 (tujuh) prioritas yaitu : (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Berdasarkan Tujuh Prioritas diatas dilakukanlah peningkatan sebagai usaha dalam pencapaian kinerja BPBD Provinsi Riau. Pelaksanaan tujuh prioritas tersebut pada BPBD provinsi Riau dengan upaya dilaksanakannya kemampuan daerah dalam menyusun strategi penanggulangan bencana untuk mendukung perencanaan pembangunan kemudian tertuang dalam kegiatan diantaranya :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Riau.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

3.1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2023 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1

Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Ketahanan daerah dalam menghadapi Bencana	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau	100 %	84,59 %	84,59 %

Dari target kinerja untuk sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau, pencapaian untuk tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif dengan nilai capaian kinerja 84,59 %. Pengukuran Kinerja BPBD Provinsi Riau dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kemudian ditetapkan sebagai target dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau.

Berikut formula perhitungannya :

$$capaian\ kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$capaian\ kinerja = \frac{84,59}{100} \times 100\% = 84,59\%$$

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2023 serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

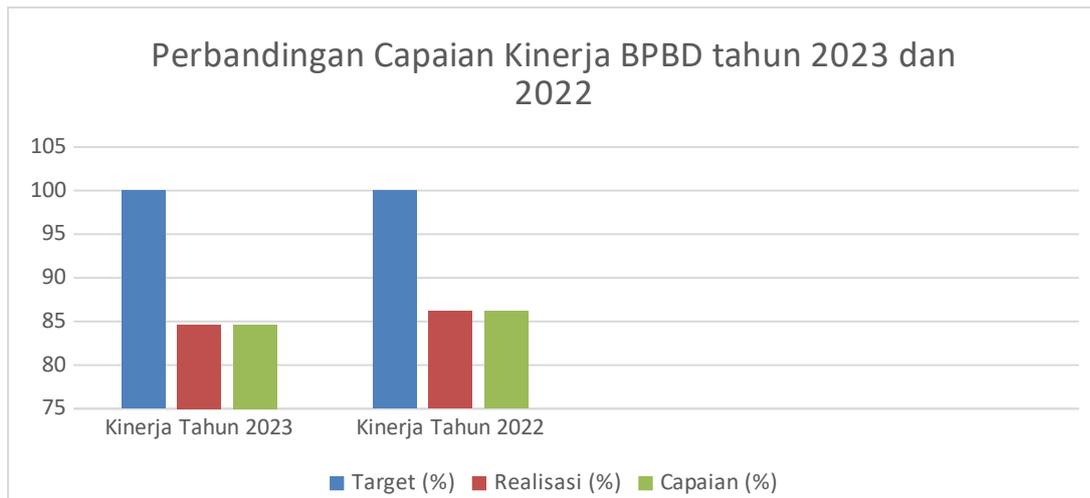
Berdasarkan atas perbaikan dokumen dari Menpan RB atas dokumen dokumen yang mendukung SAKIB RB. Untuk mengukur capaian kinerja dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2023 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2022		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau	100	84,59	84,59	100	86,18	86,18

Untuk penjelasan tiap kolom pada tabel 3.1.2 yang mengacu pada tabel 3.1.1 Berdasarkan hasil capaian Pada program penanggulangan bencana terdapat 4 kegiatan dengan uraian sub kegiatan sebanyak 19 sub kegiatan. Pada triwulan IV secara signifikan berjalan dengan baik, namun terdapat satu sub kegiatan yang dirasionalisasi yaitu pada sub kegiatan Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Zoonosis Prioritas hal ini dikarenakan kegiatan ini sifatnya situasional dan memang belum ada kejadian sehingga tidak terdapat tindak lanjut, sehingga realisasi dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja tidak tercapai seperti target yang diinginkan yang kemudian menjadi pengurangan pada capaian. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3.1.2
Capaian kinerja tahun 2022 dan 2023



3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2023 dengan Target akhir Renstra BPBD Tahun 2019-2024

Revisi Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sudah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dalam rangka pemetaan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019. Perbandingan target dan realisasi kinerja BPBD Tahun 2023 dengan Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.a
Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2023 dan
Capaian Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Renstra 2023	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau	100 %	100%	84,59 %	84,59%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa target Tahun 2023 pada Renstra BPBD sebesar 100% dengan capaian yang tinggi

sebesar 84,59 %. Dalam hal ini 7 (tujuh) prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah merupakan pendukung dalam capaian kinerja BPBD yang sangat berpengaruh dalam penentuan kegiatan dan menjadi pemandu dalam penentuan kegiatan. kemudian diharapkan bahwa kedepannya nilai capaian tersebut menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.3.b
Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2023 dan
Target Akhir Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Akhir Renstra (Target 2024)	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau	100 %	100 %	84,59 %	84,59 %

Berdasarkan hasil tabel perbandingan capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap Target akhir Renstra BPBD sebesar 84,59 %. Diharapkan nantinya pada tahun berikutnya akan ada kenaikan terhadap kinerja tahun 2023.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Secara umum standar nasional telah dilakukan mengacu pada standar nasional yang dilakukan BNPB yang mengarah kepada prioritas yang ada pada IRBI, yakni 7 Prioritas diantaranya ;

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan system informasi
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana

6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan system pemulihan bencana

Namun BPBD Provinsi Riau belum bisa membandingkan standar Nasional tersebut karena terdapat perhitungan terhadap indeks Ketahanan daerah yang mana BPBD belum melakukan perhitungan tersebut dalam capaian kinerja. Diharapkan nantinya pada tahun berikutnya bisa dilakukan perbandingan terhadap standar nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Capaian yang diperoleh pada Tahun 2023 yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pemenuhan capaian kinerja BPBD maka dituangkanlah dalam uraian sebagai berikut :

A. Keberhasilan Capaian kinerja didukung oleh :

1. Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan Bencana yang di dukung oleh masyarakat dan dunia usaha secara gotong royong.
2. Pencegahan dalam penanggulangan bencana dengan upaya pengurangan resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pada pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan Tim Respon Cepat yang terlatih.
3. Menekankan Pembangunan Kesiapsiagaan berbasis masyarakat dengan pembentukan DESTANA khususnya untuk wilayah dan kawasan rawan bencana.
4. Menekankan Pembangunan Kesiapsiagaan berbasis masyarakat dengan bantuan aplikasi SIPAKAR.
5. Penanganan Darurat dengan respon cepat oleh pemerintah, relawan pemerintah desa serta msyarakat.

Kegagalan Capaian kinerja disebabkan oleh :

1. Tidak Terlaksananya kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Zoonosis Prioritas hal ini dikarenakan kegiatan ini sifatnya situasional dan memang belum ada kejadian sehingga tidak terdapat tindak lanjut dan dengan tidak terlaksananya kegiatan ini maka kegiatan ini dirasionalisasikan dan mempengaruhi dengan nilai capaian kinerja BPBD
2. Provinsi Riau Didominasi Oleh Kawasan lahan Gambut sehingga apabila ada lahan yang terbakar maka akan sulit di padamkan.
3. Lokasi Karhutla yang sulit dijangkau, dengan minimnya ketersediaan sumber air pada kawasan area kebakaran dan terbatasnya sarana dan prasarana karhutla.
4. Ketergantungan masyarakat pada pemerintah dalam keterkaitan anggaran dan dana dalam pelaksanaan kegiatan .
5. Peran masyarakat dan dunia usaha yang belum optimal.

B. Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

1. Masyarakat melalui perangkat desa lebih insentif dan proaktif dalam mensosialisasikan tentang daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan peran serta yang aktif pemerintah dan dunia usaha agar lebih sensitive terhadap bencana dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan media masa.
3. Masyarakat dapat mengusulkan pendanaan melalui dana desa.
4. Tim Gabungan yang telah ditetapkan melakukan pemadaman pada titik api secara maksimal hingga padam serta pengawasan pada wilayah yang masih mengeluarkan asap tipis.
5. Peningkatan kemampuan Personil pemadaman yang terdiri dari : TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Perusahaan, Satpol PP, Masyarakat dan Perangkat Desa.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dengan penyerapan keuangan dalam pelaksanaan program.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan BPBD Provinsi Riau belum dapat mengoptimalkan penggunaan dana tahun 2023 sehingga belum terdapat efisiensi anggaran, dan

masih terdapat sisa dana yang belum dapat dipergunakan sebesar Rp. 1.133.016.480,00 atau 5,11 % dari pagu Dana sebesar Rp. 22.184.277.858,00. Pada tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis BPBD Provinsi Riau.

Tabel 3.1.5
Analisis Effisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6=5/4*100%
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau	100	99,78	99,78

Analisis efisiensi dilakukan terhadap sasaran dan capaian indikator kinerja mencakup 99,78 % yang mencakup pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau . Sehingga dalam peningkatan kinerja BPBD Provinsi Riau untuk tahun berikutnya maka yang terjadi pada tahun 2023 dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun berikutnya.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada Tahun 2023 BPBD pada anggaran Murni mempunyai pagu sebesar Rp. 19.629.281.514,00 dan pada perubahan anggaran tahun 2023 dengan masuknya Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana, maka pagu BPBD Provinsi Riau menjadi sebesar Rp. 22.184.277.858,00,-. Berdasarkan pagu yang telah diperoleh tahun 2023 ini didukung oleh 2 program 11 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dicapai, berikut tabel realisasi kinerja yang menggambarkan capaian tersebut :

Tabel 3.1.6
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100\%$
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau	100	84,95	84,95

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi faktor Pendukung dan Dalam Upaya Capaian pelaksanaan prioritas ketahanan daerah BPBD program/kegiatan capaian kinerja, maka dilakukanlah beberapa kegiatan agar mencapai persentase pelaksanaan yang menjadi target BPBD Provinsi Riau, adapun kegiatan yang terkait diantaranya sebagai berikut :

dapat diuraikan sebagai berikut :

Program/ Kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran kinerja

1. Dengan melakukan himbauan kepada Bupati dan Walikota Diperolehnya data dan informasi kebencanaan yang tertuang pada laporan harian (pusdatin) yang menyajikan titik hotspot dan luas lahan terbakar berikut juga luas lahan yang telah dipadamkan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Nomor Kpts.191/II/2023 tentang penetapan Status Siaga dan dilaksanakannya Apel siaga.



Gambar 3.1.6.c
Apel Kesiapsiagaan

4. Terbentuknya desa Tangguh bencana di 2 kabupaten dan 3 desa yakni :
- Pengembangan dan Pembentukan destana di Kabupaten Rokan Hilir :
 1. Pada Desa Teluk Nilap terlihat pada dokumentasi berikut :



Gambar 3.1.6.d
Pengembangan dan Pembentukan Destana di desa Teluk Nilap

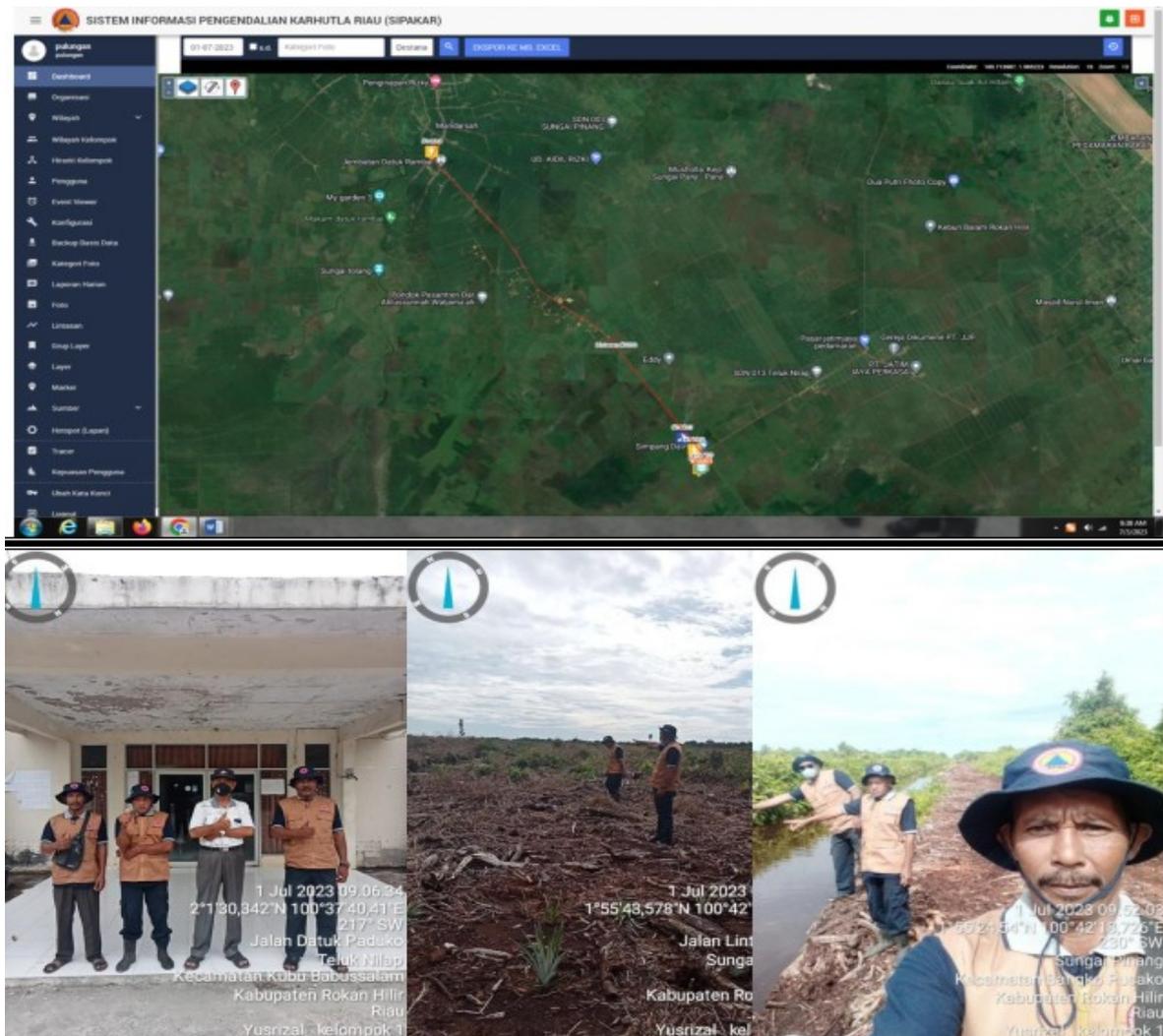
2. Pada Desa Balam Sempurna terlihat pada dokumentasi berikut :



Gambar 3.1.6.e
Pengembangan dan Pembentukan Destana di desa Balam Sempurna

3. Pengembangan dan Pembentukan destana di Kota Dumai pada Desa di kelurahan mundam terlihat pada dokumentasi berikut :

Dari pembentukan tersebut disajikan juga pendampingan pelaksanaan penggunaan aplikasi SIPAKAR yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk dan melaporkan informasi terkait seperti terlihat pada dokumentasi berikut :



Gambar 3.1.6.f
Pelaporan oleh Tim menggunakan Aplikasi SIPAKAR

5. Terbentuknya Tim Penanggulangan Bencana yang dibentuk dalam SRC (satuan Reaksi cepat) dengan surat keputusan Nomor : 03/KPTS/BPBD/I/2023 dengan tugas :

- Mencari dan menerima laporan kejadian Bencana di Provinsi Riau Tahun 2023
- Melakukan Kaji cepat dari data Laporan Kejadian Bencana Mengenai Kekuatan Personil dan Kebutuhan Peralatan Logistik dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Proinsi Riau Tahun 2023.
- Melaksanakan Uapya Penanggulangan Bencana Khususnya Operasi Pemadaman darat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2023.

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau Tahun 2023.
6. Pendistribusian Logistik dimana BPBD berupaya memberikan bantuan logistik penunjang untuk penanganan awal setelah pasca bencana seperti beras, mie instan, sarden, gula ,dan lainnya kepada 12 Kab/kota setelah kejadian bencana yang membutuhkan bantuan logistik tersebut.

3.2 Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100\%$	7	8	$9=8/7 \times 100\%$
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau	100	84,95	84,95	22.184.277.858	21.051.261.378	94,89

Pelaksanaan Kinerja Instansi Tidak Lepas dari dukungan pendanaan. BPBD tahun 2023 dengan anggaran yang dipergunakan pada Pagu Perubahan sebesar Rp..22.184.277.858,00,-. Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan APBD-P tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran

Berdasarkan Tabel diatas Penggunaan Sumber daya Keuangan untuk Capaian sasaran strategis BPBD tahun 2023 adalah sebesar Rp. 21.051.261.378,00 atau 94,89% dari total pagu sebesar Rp. 22.184.277.858,00 hal ini berarti terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 1.133.016.480,00 atau 5,10 % dari Pagu Anggaran tahun 2023.

BAB IV

KEGIATAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHANOLEH KALAKSA BPBD

KEGIATAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHANOLEH KALAKSA BPBD



PENUTUP

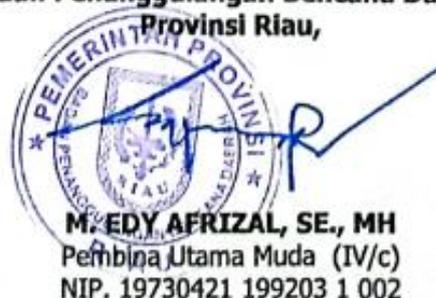
Laporan Kinerja BPBD Provinsi Riau tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Riau. Laporan Kinerja tahun 2023 disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan dari 2 Program Kegiatan yakni Program Urusan Pemerintah Daerah dan Program Penanggulangan Bencana dari 37 Sub Kegiatan diperoleh hasil pengukuran capaian indikator kinerja dengan kesimpulan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi dengan tingkat capaian 99,78 % melalui realisasi Keuangan sebesar 94,89 % sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi 5,11 %.

Laporan Kinerja BPBD tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi instansi dalam mencapai tujuan instansi serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPBD sehingga dapat menjadi penanggulangan bencana yang lebih baik.

Pekanbaru, Maret 2024

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau,**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

LAMPIRAN :



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN Telp. (0761) 22300 Fax. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2024



INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA

Pejabat Utama Muda

NIP. 19710729 199302 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. EDY AFRIZAL, SE., MH**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **S.F. HARIYANTO**

Jabatan : Pj. Gubernur Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR RIAU,



S.F. HARIYANTO

Pihak Pertama,

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau,**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Riau	0,58
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	65

No	Program /kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Program penanggulangan Bencana	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	44.905.000,00
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	460.079.436,00
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	189.181.600,00
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	230.964.000,00
	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah provinsi	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.867.957.587,00
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.00,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	694.636.648,00
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.824.880,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.847.086.026,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.812.000,00
	Jumlah	15.982.447.177,00

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR RIAU,



S/FI HARIYANTO

Pihak Pertama,

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau,**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002